



Jurnal Saraq Opat, Vol 4 No 1 Januari 2022 pp 19-31

e-ISSN: 2809-8129; p-ISSN : 2809-817X

Received 14 November 2021 / Revised 3 Desember 2021 / Accepted 24 Desember 2021

Saraq Opat : Jurnal Administrasi Publik

<https://jurnal.ugp.ac.id/index.php/SaraqOpat>

PATOLOGI BIROKRASI PENYELENGGARAAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG DI KECAMATAN BEBESEN KABUPATEN ACEH TENGAH

Muhammad Rusli¹, Alzikri Fakhurraji², Hajar Ashwad³.

Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Putih.

Aceh. Indonesia

Dosen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Putih.
Aceh Indonesia

Dosen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Putih.
Aceh Indonesia

*Corresponding Email:

Muhammad Rusli@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui Patologi Birokrasi Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kampung di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah dan menjelaskan Faktor terjadinya patologi Birokrasi dalam Badan Usaha Milik Kampung di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, studi pustaka dan observasi. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Patologi Birokrasi Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kampung di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah. Penyebab patologi dalam BUMK adalah rendahnya sumberdaya manusia dan memiliki keterbatasan dalam mengelola penggunaan anggaran yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan anggaran dan penggunaan pendanaan BUMK kebanyakn sebagai simpan Pinjam, yang tidak dapat dikembalikan oleh masyarakat, Faktor terjadinya patologi Birokrasi dalam Badan Usaha Milik Kampung di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah sumber daya manusia hambatan yang dialami oleh sumber daya manusia di kecamatan Bebesen, dalam mengelola BUMK di masing-masing Kampung. Tidak adanya pengaturan pengupahan yang diatur oleh Qanu Kampung Atau pun dalam Qanun Kampung tentang BUMK dan pengupahan terhadap struktur BUMK itu sendiri. Kesimpulan patologi BUMK di kecamatan bebesen, memiliki factor-factor yang kompleks berkaitan dengan, tidak memiliki kemampuan dalam mengelola dan minimnya sumberdaya manusia dalam pengelolaan BUMK di kecamatan Bebesen.

Kata Kunci: Patologi, Birokrasi, BUMK, BUMDEs

PENDAHULUAN

Tujuan Umum Reformasi Birokrasi adalah membangun profil dan perilaku aparatur Negara yang berintegritas tinggi, produktif, disiplin dan mampu memberikan pelayanan prima kepada publik. Tujuan secara khusus Reformasi Birokrasi adalah membangun birokrasi yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel dalam melayani dan memberdayakan masyarakat.

Karena kurangnya disiplin aparatur birokrasi pemerintah, tidak memiliki rasa tanggung jawab serta sering dari konsep, inisiatif maupun daya kreativitas serta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak memuaskan adalah sebagai sebagian penyakit yang diderita oleh suatu birokrasi. Dan kiranya tidak akan jauh dari kenyataan empirik apabila dikatakan bahwa tidak ada birokrasi yang betul-betul bebas dari berbagai "penyakit birokrasi" dan sebaliknya tidak ada birokrasi yang "menderita semua penyakit yang mungkin menghinggapinya"

Penyelenggaraan Badan Usaha milik Desa, pada setiap kecamatan masih sulitnya perkembangan dari BUMDES tersebut yang diakibatkan sumber daya manusianya tidak memiliki manajemen dan kepemimpinan, penyebab inilah yang membuat birokrasi BUMDES masih berkembang, yang merupakan sebuah penyakit dalam penyelenggarannya sendiri.

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang sekarang menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa "Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa" dan juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) no. 71 Tahun 2005 Tentang Desa. Pendirian badan usaha desa ini disertai dengan upaya penguatan

kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat desa dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha milik Desa merupakan lembaga ekonomi baru yang berjalan di pedesaan, maka mereka masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangun landasan bagi pendirian BUMDes adalah Pemerintah, baik pusat ataupun daerah.

Beberapa fenomena praktek birokrasi pada Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah yaitu kurangnya sarana dan prasarana dan factor sumber daya manusia, dan lebih mementingkan keperluan atau kebutuhannya yang menyebabkan terjasinya patologi pada tubuh BUMK di kecamatan bebesen, sehingga BUMK masih belum berkembang secara maksimal dan juga kurangnya dukungan dari pemerintah Kampung, hal ini mempengaruhi terhadap tingkat kualitas BUMK dan berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan masyarakat. Serta lemahnya manajemen dalam pengelolaan BUMK di Kampung tersebut. BUMK di kecamatan bebesen di canangkan sejak tahun 2016, dimana setiap BUMK di kecamatan Bebesen sesuai dengan perintah Kabupaten Aceh Tengah, BUMK di kecamatan Bebesen lebih kepada Simpan Pinjam, Sewa Tratak, Usaha kecil yang membidangi toko kerawang dan yang lainnya, hasil observasi dilapangan penulis merangkumkan anggaran masing-masing BUMK bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan pemahaman reje kampung terhadap BUMK tersebut dan sesuai dengan Pengajuan dari ketua BUMK itu sendiri.

BUMK pada Kecamatan Bebesen, manajemen kinerja BUMK pada kampung masih buruk karena kurangnya anggota dalam kepengurusan BUMK, hal ini dikarenakan ada beberapa anggota yang mengundurkan diri dari kepengurusan BUMK, dengan demikian setiap anggota

BUMK yang ada saat ini, mereka merangkap jabatan. Dan dalam BUMK ini masih belum memiliki tujuan yang pasti maksudnya yaitu belum ada planning untuk kegiatan selanjutnya, jadi pada setiap kegiatan berjalan begitu saja, dan hal ini mengakibatkan BUMK pada Kampung-kampung di kecamatan bebesen belum berkembang dengan baik.

Manajemen kinerja BUMK masih belum maksimal dan bisa dikatakan buruk karena belum adanya kantor/tempat untuk mengoptimalkan segala kegiatan BUMK dan menghambat seluruh pengurus untuk mengadakan rapat atau semacamnya. Hal ini mengakibatkan manajemen kinerja BUMK menjadi lemah.

Ada beberapa persepsi masyarakat mengenai problem-problem birokrasi pengelolaan BUMK *Pertama* yaitu mengatakan bahwa belum adanya sosialisasi tentang manfaat dan tujuan BUMK kepada masyarakat sehingga mengakibatkan BUMK belum dikenal secara mendalam oleh masyarakat setempat. *Kedua* yaitu juga mengatakan bahwasannya BUMK belum adanya sosialisasi mengenai manfaat dan tujuan BUMK secara menyeluruh bagi masyarakat kecamatan Bebesen, karena dengan adanya sosialisasi mungkin bisa lebih meningkatkan kualitas BUMK dan juga masyarakat mengetahui bahwa BUMK hanya menyalurkan sembako kepada masyarakat yang berkekurangan padahal ada beberapa manfaat BUMK bagi seluruh masyarakat. Untuk itu sangat diperlukan sekali adanya sosialisasi mengenai BUMK kepada masyarakat. *Ketiga* yaitu bahwa belum adanya upah untuk pengurus BUMK sehingga mengakibatkan manajemen kinerja pengurus BUMK tidak maksimal bahkan ada pengurus yang keluar dari kepengurusan BUMK. Dan juga BUMK tersebut belum adanya sosialisasi kepada masyarakat, hal ini banyak masyarakat yang meremehkan akan keberadaan BUMK.

Adapun tujuannya mengetahui Patologi Birokrasi Penyelenggaraan BUMK dan

faktor terjadinya patologi Birokrasi dalam BUMK di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah

Patologi birokrasi adalah penyakit dalam birokrasi Negara yang muncul akibat perilaku para birokrat dan kondisi yang membuka kesempatan untuk itu, baik yang menyangkut politis, ekonomis, sosialkultural dan teknologikal. (Siagian, 2000, p. 2)

Weber sebenarnya memperhitungkan tiga elemen pokok dalam konsep birokrasinya, yaitu: (1) birokrasi dipandang sebagai instrument teknis. (2) birokrasi dipandang sebagai kekuatan independen. (3) birokrasi dipandang mampu keluar dari fungsinya yang sebenarnya karena anggotanya cenderung berasal dari kelas social yang particular. (Thoha, 2005, p. 15)

Terminologi birokrasi dalam literature ilmu administrasi public dan ilmu politik, sering digunakan dalam beberapa pengertian. Dari berbagai macam pengertian yang sering muncul dalam teori birokrasi, dapat di sistematisasikan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu: birokrasi dalam pengertian yang baik atau rasional, birokrasi sebagai suatu penyakit, birokrasi dalam pengertian yang netral, artinya tidak terkait dengan pengertian buruk. (Dwiyanto, 2003, p. 1)

Berbagai keluhan dan kritikan mengenai kinerja birokrasi memang bukanlah baru lagi, karena sudah ada sejak zaman dulu. Birokrasi lebih menunjukkan kondisi empirik yang sangat buruk, negatif atau sebagai suatu penyakit (*bureaupatology*), seperti parkinsonian (*bigbureaucracy*), Orwellian (peraturan yang menggurita sebagai perpanjangan tangan negara untuk mengontrol masyarakat) atau Jacksonian (*bureaucratic polity*), ketimbang citra yang baik atau rasional (*bureau Rationality*)

Pelayanan publik menurut Sinambela adalah "pemuahan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara Negara" (Poltak, 2006, p. 5)

Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi didalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan dan pada hakekatnya tidak berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu, proses produksinya mungkin juga tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik. (Hardiyansyah, 2011, p. 23)

Pelayanan yang memuaskan pengguna jasa, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan public yang profesional, kemudian Poltak Sinambela, dkk mengemukakan asas-asas dalam pelayanan publik tercermin dari: Transparansi, Akuntabilitas, Kondisional, Partisipatif, Kesamaan Hak, Keseimbangan Hak dan Kewajiban. (Litjan, 2011, pp. 5-7)

Penelitian terdahulu menghasilkan bahwa diperoleh peningkatan pendapatan terjadi pada pengguna dana BUMDesa dibidang perdagangan kios sembako, perdagangan kelontong, perdagangan bakulan, dan pada usaha rumah tangga seperti usaha kue kering, kue basah dan kerupuk. Persamaan dari jurnal ini yaitu sama-sama membahas tentang BUMDesa dan sama-sama menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif deskriptif, beberapa tahap, yaitu: *indepth interview* dengan partisipan yang menjadi aktor kunci dalam BUMDes, tahap selanjutnya melakukan *Diskusi Kelompok* berdasar kelompok kepentingan yang ada didesa tersebut, dan pada tahap terakhir dilakukan *Focus Group Discussion* dimana diskusi dilakukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Hasil dari penelitian jurnal ini menunjukkan keberadaan BUMDes tidak dipungkiri membawa perubahan di bidang ekonomi dan sosial.

METODE PENELITIAN

Metode merupakan salah satu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatucara kerja (sistematis) untuk mengetahui atau memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. (Moleong, 2018)

Penelitian merupakan penelitian jenis kualitatif, karena penelitian ini berfungsi untuk menjelaskan fenomena sedalam-dalamnya dengan cara mengumpulkan data-data dengan mengedepankan kualitas bukan kuantitas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, untuk mendapatkan tujuan uraian yang sangat mendalam tentang tulisan, ucapan dan tingkah laku yang di amati dari suatu individu, kelompok, masyarakat maupun organisasi, adapun pengumpulan data, menggunakan penelitian ini disesuaikan dengan informasi atau subjek penelitian (Iskandar, 2009, p. 11).

Menurut (Suharsimi, 2011, p. 124) observasi merupakan pengamatan yang dilakukan ataupun di jalakan dengan melakukan berbagai usaha-usaha secara langsung dengan menggunakan penyelidikan

Sedangkan menurut Kamus Ilmiah Populer (Suardeyasari, 2010, p. 9) obrservasi dapat diartikan sebagai pengamatan yang perlu di teliti secara sistematis, dan dilakukan secara berulang-ulang. Metode teknik observasi seperti yang di tuturkan Hadi dan Nurkencana dalam (Suardeyasari, 2010, p. 9) merupakan metode pengumpulan data untuk melakukan pengamatan, pencatatan dengan sistematis, secara langsung maupun tidak langsung di tempat yang diamati. (Joesyiana, 2018), pengamatan langsung terhadap Patologi Birokrasi

Penyelenggaraan BUMK dan faktor terjadinya patologi Birokrasi dalam BUMK di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah.

Wawancara pada Penelitian ini, dengan mempergunakan keterangan yang di peroleh tentang Patologi Birokrasi Penyelenggaraan BUMK. Diwawancarai pada Penelitian ini yaitu BUMK, Reje Kampung, camat, dan masyarakat dan berkaitan Patologi Birokrasi Penyelenggaraan BUMK dan faktor terjadinya patologi Birokrasi dalam BUMK di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah.

Selanjutnya adalah proses menganalisis data. Analisis data dimulai dari menelaah seluruh data, menghubungkan data, mereduksi data dan yang terakhir adalah penyajian data dari hasil wawancara dan observasi.

Patologi Birokrasi Penyelenggaraan BUMK dan faktor terjadinya patologi Birokrasi dalam BUMK di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, disajikan dalam bentuk analisis deskriptif yaitu penyajian dengan menggambarkan atau menjelaskan hasil penelitian dengan kalimat bukan ke dalam statistik. Di akhiri dengan proses menarik kesimpulan dengan proses induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk-Bentuk Patologi

Patologi birokrasi merupakan suatu masalah yang sering dijumpai diberbagai Instansi. Berbagai bentuk dari Patologi Birokrasi mulai dari Penyalahgunaan wewenang atau jabatan, Menerima Suap/sogok, serta Nepotisme merupakan suatu hal yang sering terjadi baik di Pemerintahan maupun Swasta. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Hermansyah selaku Camat Bebesen, "terjadinya ketidak pahaman tentang bagaimana mengelola BUMK itu sendiri, sehingga tidak, berjalan dengan baik, yang menyebabkan BUMK tidak berjalan dengan baik, di awal sudah disusun kemana arah

penyelenggaraan BUMK, saat berjalan BUMK sesuai dengan yang di inginkan, terbatasnya sumber daya yang ada di kampung, tingkat pendidikan masih rendah dalam mengelola pendanaan BUMK itu sendiri, ini hampir terjadi setiap BUMK.

Sama halnya seperti yang dituturkan oleh bapak Yustia selaku Kasi Pemberdayaan Kampung Kecamatan Bebesen, mengatakan: "terjadinya patologi, penyelenggaraan BUMK di sebabkan oleh sumber daya yang rendah, pemilihan ketua berdasarkan kemauan reje kampung, bahkan dekat dengan reje kampung, tidak memilh dengan pendidikan mumpuni, dalam menjalankan BUMK tersebut, penyakit ini lumayan sulit kita atasi yang di sebabkan tidak memahami dalam pengelolaan BUMK, sehingga anggaran BUMK tidak berujung dan berdampak untuk kebutuhan masyarakat Bebesen sendiri.

Meningkatkan daya guna dan hasil guna dari suatu pekerjaan tersebut juga dilakukan dengan cara mengikuti pendidikan dan pelatihan yang adamengenai pekerjaan tersebut agar pekerjaan yang dilakukan dapat maksimal dan juga para penyenggara sudah terlatih untuk mengerjakan pengelolaan BUMK tersebut dan dapat membagikan ilmu yang di dapat kepada pegawai lain agar dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna dari pekerjaan yang mereka lakukan dan untuk dapatmelemahkan patologi yang mungkin saja terjadi apabila pegawai tidak mengerti dan pahami mengenai pekerjaan yang merekalakukan dan mengakibatkan malas datang ke kantor dan juga tidak tepat waktu dalam pekerjaan yang para pegawai lakukan tersebut.

Untuk menghindari kejadian ataupun penyalahgunaan jabatan dan pengelolaan BUMK, kita selalu mengadakan pelatihan untuk menunjang pemahaman dalam pengelolaan BUMK di kampung masing-masing yang berada di bawah wilayah kecamatan Bebesen" Dalam menjalankan

BUMK tentu saja membutuhkan manajemen yang baik agar BUMK dapat berjalan efektif dan efisien. Karena manajemen merupakan suatu sarana untuk mencapai tujuan organisasi dengan memanfaatkan alat/sarana yang tersedia semaksimal mungkin.

Dengan adanya manajemen yang baik maka manajemen kinerja juga sangat diperlukan dalam mensukseskan suatu tujuan yang ingin dicapai. Maka dari itu dengan adanya manajemen kinerja yang baik maka dapat meningkatkan kinerja dari semua potensi yang dimiliki, dan juga manajemen diperlukan untuk kemajuan, dan pertumbuhan serta perkembangan agar lebih baik lagi. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Abdul Latif selaku Reje Kampung Kramat, di Kampung Kramat bahwa manajemen kinerja BUMK masih buruk karena kurangnya anggota dalam kepengurusan BUMK hal ini dikarenakan ada beberapa anggota yang mengundurkan diri dari kepengurusan BUMK, dengan demikian setiap anggota BUMK yang ada saat ini, mereka merangkap jabatan.

BUMK ini masih belum memiliki tujuan yang pasti maksudnya yaitu belum ada planning untuk kegiatan selanjutnya, jadi pada setiap kegiatan berjalan begitu saja, dan hal ini mengakibatkan BUMK pada Kampung Kramat belum berkembang dengan baik. Sama halnya seperti yang dituturkan oleh Bapak Arsi Kandi selaku Reje Kampung Blang Kolak, mengatakan: Disisi lain, salah satu anggota BUMK Kampung Blang Kolak, bahwasannya manajemen kinerja BUMDK masih belum maksimal dan bias dikatakan buruk karena belum ada danya kantor/tempat untuk mengoptimalkan segala kegiatan BUMK dan menghambat seluruh pengurus untuk mengadakan rapat atau semacamnya. Hal ini mengakibatkan manajemen kinerja BUMK menjadilemah.

Dengan demikian perkembangan BUMK masih terhambat oleh dana yang belum mencukupi. Hal ini mengakibatkan

BUMK masih belum sesuai dengan konsep yang disampaikan oleh Santosa (2008:339) karena Dana Desamasih belum sepenuhnya membiayai program Pemerintahan Kampung serta pemberdayaan masyarakat. Dan juga perkembangan BUMK yang masih stakan artinya belum berkembang secara pesat dan ini mengakibatkan kualitas BUMK masih rendah.

Manusia yang berkarakter merupakan penguatan pola tindak dan pola pikir untuk menjauhkan diri dari pada perbuatan yang dapat menciptakan virus-virus patologi penyelenggaraan dalam pekerjaan yang pada gilirannya akan mematikan atau menghancurkan pekerjaan itu sendiri. Dalam artian karakter yang baik dan positif dari masing-masing petugas akan menghasilkan pekerjaan yang baik dan juga dapat melemahkan patologi yang bisa saja terjadi apabila karakter dari masing-masing pegawai tidak baik. Santosa (2008:339) mengemukakan bahwasannya Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai Program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi tersebut, maka setiap Kabupaten/Kota mengalokasikan kepada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa.

Dana desa merupakan pokok penunjang dalam mendanai infrastruktur vital dan pokok penunjang fasilitas-fasilitas desa yang harus direvitalisasi demi mendorong kemajuan sumber daya ekonomi desa dan kemajuan sumber daya lainnya. Dan dana desa dibagi untuk

beberapa organisasi yang ada di desa. Dan itu pasti ada pembagian dana yang masih belum cukup untuk pembangunan suatu organisasi. Seperti yang dituturkan oleh bapak Agus Salim selaku Sekretaris Camat Kecamatan Bebesen, mengatakan “saya lihat hampir setiap tahun, ADK di salurkan kepada BUMK, untuk memenuhi kebutuhan BUMK tersebut, tapi hampir semua BUMK di kecamatan Bebesen tidak berjalan dengan seperti di daerah lain, penyebabnya, kurang SDM, adapun SDM tidak mau ataupun tidak terpilih menjadi ketua BUMK itu sendiri”.

BUMK di kampung Blang Kolak, masih kekurangan SDM. Yang sehingga, banyak anggota yang mengundurkan diri, dari struktur BUMK sehingga tidak berjalan dengan baik, bahkan penggunaan anggaran tidak tepat sasaran lebih kepada simpan pinjam, yang menyebabkan yang di pinjam tidak di balikan, apa lagi dengan kondisi saat ini, Covid-19.

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pembangunan. Oleh karena itu dalam melaksanakan pembangunan suatu wilayah atau negara perlu diketahui keadaan sumber daya manusia yang ada di wilayah tersebut. Semakin lengkap dan tepat data mengenai sumber daya manusia yang tersedia, semakin mudah dan tepat pula perencanaan pembangunan yang dibuat. Sonny Sumarsono (2003:4), Sumber Daya Manusia atau *human resources* mengandung dua pengertian. *Pertama*, adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi.

Dalam hal lain SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian *kedua*, SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi

kebutuhan atau masyarakat. BUMK di kecamatan Bebesen dalam hal SDM masih sangat minim untuk itu perlu diadakannya perekrutan ulang untuk anggota BUMK karena selama ini BUMK kesusahan untuk menjalankan pekerjaannya karena tidak adapembagian kerja yang baik dan pegawai tidak fokus dalam satu pekerjaan saja, dan hal tersebut proses perkembangan BUMK menjadi terhambat.

Halini BUMK masih belum sesuai dengan konsep Sonny Sumarsono karena pada BUMK ini SDM-nya belum memadai sehingga proses produksi menjadi terhambat. Dengan demikian kualitas sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam setiap gerak pembangunan. Hanya dari sumber daya manusia yang berkualitas tinggilah yang dapat mempercepat pembangunan dalam suatu organisasi. Apabila SDM rendah maka perkembangan suatu organisasi akan terhambat.

Dengan terwujudnya kedalaman penghayatan dan pengamalan ajaran keyakinan (spritual) yang dipercayainya akan dapat melemahkan dan mungkin menghilangkan pikiran dan tindakan persekongkolan dalam mempertahankan suatu bentuk pekerjaan walaupun sangat menjanjikan dalam pemenuhan harapan hidupnya. Dengan kata lain dalam menciptakan spiritual yang baik diharapkan dapat mempengaruhi produktivitas pegawai dalam bekerja karena spiritual yang baik dalam diri seorang dapat melemahkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dapat terjadi.

2. Fasilitas Kerja Badan Usaha Milik Kampung

Fasilitas kerja merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan untuk menambah semangat, kenyamanan dan kesenangan karyawan dalam bekerja, terutama gedung/kantor untuk bekerja, karena jika kantor belum terpenuhi maka karyawan akan merasa tidak nyaman dalam bekerja

sehingga mengakibatkan lemahnya manajemen kinerja pegawai.

Suad Husnan (2002: 187) mengemukakan bahwasannya fasilitas kerja merupakan suatu bentuk pelayanan perusahaan terhadap karyawan agar menunjang kinerja dalam memenuhi kebutuhan karyawan, sehingga dapat meningkatkan produktifitas kerja karyawan, dan juga dengan adanya fasilitas kerja yang disediakan oleh perusahaan sangat mendukung karyawan dalam bekerja. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Iskandar Selaku Ketua BUMK Sara Ate Kampung Umang Kecamatan Bebesen, BUMK pada Kampung Umang, fasilitas kerja anggota masih belum memadai khususnya gedung/kantor BUMK karena memang kurangnya dana untuk pembangunan.

Hingga saat ini kantor masih menyewa dan bahkan kantor tersebut banyak yang bocor pada musim penghujan sehingga tidak bisa digunakan untuk menyimpan serta menyalurkan BPNT. Dengan belum adanya kantor mengakibatkan menurunnya manajemen kinerja pegawai BUMK dan mengakibatkan dua anggota BUMK mengundurkan diri. Dan apabila kantor BUMK sudah dibangun dan sudah maksimal, masyarakat yang memiliki produk yang bias dijual belikan dapat dikumpulkan menjadi satu di kantor BUMK untuk dijual, hal tersebut mempermudah masyarakat tanpa menitipkan produknya ke toko-toko yang lain. BUMK Kampung Pendere masih belum sesuai dengan konsep fasilitas kerja masih belum terpenuhi secara maksimal dan belum memberikan kenyamanan kepada pegawai.

Dengan demikian fasilitas kerja terutama kantor kerja sangat berpengaruh dalam kinerja pegawai, karena dapat menumbuhkan semangat, kenyamanan serta kepuasan pegawai dalam bekerja dan mungkin tidak menimbulkan adanya anggota yang mengundurkan diri, sehingga

pegawai dapat bekerja sesuai job mereka masing-masing tanpa adanya rangkap jabatan.

3. Belum Adanya Sistem Upah

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha/pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan."(Undang-undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2000, Bab I, pasal 1, Ayat 30).

BUMK di kecamatan Bebesen belum ada system upah bagi pekerjanya hal tersebut mengakibatkan terdapat anggota BUMK yang mengundurkan diri karena mereka merasa dirugikan selama bekerja di BUMK pada kecamatan Bebesen.

Hal ini BUMK masih belum sesuai dengan UU tentang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2000, Bab I, pasal 1 Ayat 30. Bahwasannya BUMK pada Kecamatan Bebesen belum memberikan upah kepada pekerja karena upah merupakan jasa yang telah mereka lakukan/kerjakan. Oleh karena itu perlu diadakannya sistem upah pada BUMK tersebut karena untuk kepuasan pekerja dalam bekerja serta upah merupakan bentuk apresiasi atas kerja pegawai dan pegawai tidak merasa dirugikan. Dan ini agar BUMK dapat maju dengan termaksimalkannya kinerja pegawai.

Patologi birokrasi dalam arti kata lain adalah penyakit, perilaku negatif, atau penyimpangan yang dilakukan pejabat atau lembaga birokrasi dalam rangka melayani publik, melaksanakan tugas, dan menjalankan program pembangunan. Menurut Sondang P. Siagian, secara umum, Patologi birokrasi adalah penyakit dalam birokrasi Negara yang muncul akibat perilaku para birokrat dan kondisi yang

membuka kesempatan untuk itu, baik yang menyangkut politis, ekonomis, social cultural dan teknologikal. Dalam Ilmu Administrasi Publik, birokrasi memiliki sejumlah makna, diantaranya adalah pemerintahan yang dijalankan oleh suatu biro yang biasanya disebut dengan officialism, badan eksekutif pemerintah (*the executive organs of government*), dan keseluruhan pejabat publik (*public officials*), baik itu pejabat tinggi ataupun rendah.

Diantara ketiga makna tersebut, karakteristik umum yang melekat pada birokrasi adalah keberadaannya sebagai suatu lembaga pemerintah. Adapun patologi di kecamatan Bebesen pada usaha BUMK dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1

Patologi birokrasi BUMK di kecamatan Bebesen

No	Kampung	Patologi
1.	Lemah	1. Pengupah yang tidak sesuai dengan pendapat 2. Pengelolaan yang kurang baik 3. Sering terjadinya Pergantian kepengurusan
2.	Mongal	1. Terjadinya konflik kepengurusan 2. BUMK tidak memiliki laba 3. Simpan pinjam yang tidak di kembalikan oleh masyarakat
3.	Belang Kolak	1. Masyarakat tidak mau menjadi ketua BUMK 2. Pengupahan tidak sesuai 3. Pengupahan tidak dilakukan setiap bulanya
4.	Pendere	1. Kurang

		pemahaman tentang BUMK 2. Kurangnya pelatihan tentang BUMK
5.	Daling	1. Terjadinya penggunaan anggaran tidak jelas dan tidak bermamfaat 2. Konflik kepengurusan 3. Kurangnya keterlibatan masyarakat
6.	Burbiah	1. Tidak memahami tujuan BUMK sepenuhnya 2. BUMK bukan untuk kepentingan kelompok 3. Sistem pengupahan kurang maksimal
7.	Bebesen	1. BUMK sudah mulai menghasilkan, tetapi pengupahan belum maksimal 2. Kepengurusan tidak sependapat sehingga terjadinya pengunduran diri keanggotaan

Sumber: data diolah peneliti beberapa kampung

Tabel diatas, menggambarkan dari beberapa kampung yang di kecamatan bebesen, mempunyai kemiripan tentang terjadinya patologi BUMK yang berada di kecamatan bebesen. Makna birokrasi sebagai lembaga pemerintah muncul karena lembaga pemerintah pada umumnya selalu berbentuk birokrasi. Skala

organisasi pemerintah yang besar dan luas cakupannya mendorong mereka untuk memilih birokrasi yang memiliki karakteristik sebagai birokrasi Weberian. Weber sebenarnya memperhitungkan tiga elemen pokok dalam konsep birokrasinya, yaitu: (1) birokrasi dipandang sebagai instrumen teknis. (2) birokrasi dipandang sebagai kekuatan independen. (3) birokrasi dipandang mampu keluar dari fungsinya yang sebenarnya karena anggotanya cenderung berasal dari kelas social yang particular. (Thoha, 2005, p. 88)

Birokrasi pemerintah diposisikan sebagai kekuatan yang netral, lebih mengutamakan kepentingan Negara dan rakyat secara keseluruhan, sehingga siapapun kekuatan politik yang memerintah birokrat dan birokrasinya memberikan pelayanan terbaik kepadanya. Menurut Bennis, birokrasi merupakan penemuan sosial yang sangat elegan, suatu bentuk kemampuan yang luar biasa untuk mengorganisasikan, mengkoordinasikan proses-proses kegiatan yang produktif pada masa revolusi Industri. Birokrasi dikembangkan untuk menjawab berbagai persoalan yang hangat pada waktu itu, misalnya persoalan pengurangan peran-peran personal, persoalan subyektivitas yang berlebihan, dan tidak diharganya hubungan kerja kemanusiaan.

Profesionalisme manusia yang lemah dalam sebuah birokrasi sebenarnya dapat dipastikan akan berakibat negative terhadap perkembangan birokrasi itu sendiri karena produktivitas birokrasi semakin lemah dan semangat kerja pun menurun. Rasionalisme manusia birokrasi yang lemah berakibat kreativitas dalam melakukan suatu aktivitas semakin lemah pula dan hasil kerjanya pun semakin berkurang.

Manusia dalam birokrasi yang memiliki moralitas yang lemah dapat berakibat perubahan yang dilakukan itu selalu saja merugikan birokrasi bahkan dapat mematikan birokrasi itu sendiri.

Makmur (2007 : 88) menyatakan virus penyakit atau patologi birokrasi diatas, dapat menciptakan pertanyaan bahwa apakah virus penyakit atau patologi birokrasi itu dapat disembuhkan dengan menggunakan terapi yang tepat? Sebagaimana kita telah ketahui bahwa jiwa/roh dan fisik birokrasi adalah manusia, demikian pula halnya dengan virus penyakit/patologi birokrasi itu adalah manusia juga, oleh sebab itu birokrasi memerlukan manusia yang memiliki keunggulan:

a) Unggul dalam penguasaan ilmu dan teknologi

Peranan ilmu dan teknologi dapat mendorong manusia untuk berusaha menggunakan pemikirannya yang berorientasi kepada rasionalitas dan bertindak secara terampil, sehingga manusia yang bersangkutan terhindar dari pikiran dan tindakan yang bersifat egoisme.

b) Unggul dalam penguasaan strategik

Dengan penguasaan strategic dalam persaingan kemungkinannya akan dapat terhindar dari pemikiran dan tindakan yang bersifat egoisme.

c) Unggul dalam berkolaborasi

Keberhasilan suatu birokrasi sangat tergantung kepada tindakan kolaborasi dengan menghadiri sifat-sifat egoism untuk meraih keberhasilan dan tidak merugikan pihak lainnya.

d) Unggul dalam bernegosiasi

Tujuan utama dalam birokrasi melakukan negosiasi adalah untuk menciptakan kedinamisan birokrasi itu sendiri, sehingga mampu memberikan kesejahteraan para anggotanya dalam rangka mencegah penyakit/patologi egoism yang kemungkinan menyerang setiap anggota birokrasi.

e) Unggul dalam penguasaan informasi

Menguasai kecepatan dan keakuratan informasi yang dapat

mempengaruhi dan kualitas kerja bagi para anggota birokrasi. Kecepatan dan keakuratan informasi yang dapat diakses oleh setiap anggota birokrasi akan dapat memenangkan dalam suatu bentuk persaingan secara positif dan rasional.

Berbagai jenis pekerjaan ada jenis pekerjaan, kerjanya ringan tetapi hasilnya besar, dan ada juga yang sebaliknya jenis pekerjaan kerjanya berat hasilnya kurang. Demikian pula halnya dengan pekerjaan dalam jabatan, semakin berat pekerjaan dalam jabatan itu semakin kecil hasil yang diperolehnya (upah yang diberikan kepada pekerja), dan semakin ringan pekerjaan dalam jabatan itu semakin besar hasil yang dapat diperolehnya.

Fenomena pekerjaan tersebut merupakan penyebab utama terjadinya persengkokolan dalam pekerjaan yang merupakan salah satu jenis penyakit/patologi birokrasi dimana virusnya masih mewabah di berbagai negara dibelahan dunia ini, terutama pada negara-negara yang sedang berkembang. Padanegara-negarayang sedang berkembang senantiasa selalu dihadang oleh virus penyakit/patologi yang berupa persengkokolan dalam rangka pendistribusian pekerjaan, terutama pekerjaan itu yang melekat pada jabatan dan lebih banyak kontribusi besaran penghasilan bagi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan terutama pada jenjang yang tertinggi.

Patologi birokrasi terjadi karena persepsi yang tidak tepat dan perilaku serta gaya manajerial yang menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi dan dapat menyebabkan timbulnya patologi tertentu dalam birokrasi pemerintahan. Beberapa bentuk patologi birokrasi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat yaitu seperti penyelewengan jabatan dan wewenang, kurang tanggung jawabnya seorang pemimpin dalam kepemimpinannya, menerima suap,

pembengkakan anggaran, prosedur yang berlebihan sehingga mengakibatkan pelayanan menjadi berbelit-belit dan kurang menguntungkan bagi masyarakat ketika dalam keadaan mendesak, dan masih banyak lagi. Dengan hal ini manajemen birokrasi perlumen ciptakan suasana yang kondusif bagi terciptanya iklim kerja aparatur yang profesional. Pimpinan birokrasi perlu menerapkan bentuk-bentuk strategi manajemen organisasi yang mampu membawa organisasi kearah yang lebih baik dan tanggap terhadap perubahan situasi dan kondisi khususnya di era globalisasi. Tidak hanya pada pemerintahan pusat saja terjadi adanya patologi birokrasi, bahkan pada pemerintahan daerah pun juga terjadi adanya patologi birokrasi. Kemandirian suatu daerah merupakan tuntutan dari pemerintah pusat saat diberlakukannya otonomi pada masa orde baru yaitu pada tahun 1966.

Era otonomi ini membuat daerah-daerah yang adadi Indonesia berlomba-lomba untuk menjadi daerah yang terbaik diantara daerah-daerah lainnya. Demi tercapainya keinginan suatu daerah untuk memajukan dan mengembangkan daerahnya serta untuk mensejahterakan masyarakat, maka setiap daerah harus menjalankan pemerintahannya untuk dapat memaksimalkan gunamendukung peningkatan kehidupan yang lebih baik, baik itu dalam bidang ekonomi, social maupun politik.

Patologi birokrasi telah lama menggerogoti birokrasi peyelenggaraan BUMK di Kecamatan Bebesen yang menyebabkan rendah nyakualitas BUMK. Patologi birokrasi merupakan suatu masalah yang sering dijumpai diberbagai Instansi. Berbagai bentuk dari Patologi Birokrasi mulai dari Penyalahgunaan wewenang atau jabatan, Menerima Suap/sogok, serta Nepotisme merupakan suatu hal yang sering terjadibaik di Pemerintahan maupun Swasta. terjadinya ketidak pahaman tentang bagaimana

mengelola BUMK itu sendiri, sehingga tidak berjalan dengan baik, yang menyebabkan BUMK tidak berjalan dengan baik, di awal sudah disusun kemana arah penyelenggaraan BUMK, saat berjalan BUMK sesuai dengan yang di inginkan, terbatasnya sumber daya yang ada di kampung, tingkat pendidikan masih rendah dalam mengelola pendanaan BUMK itu sendiri, ini hampir terjadi setiap BUMK.

Menjalankan BUMK tentu saja membutuhkan manajemen yang baik agar BUMK dapat berjalan efektif dan efisien. Karena manajemen merupakan suatu sarana untuk mencapai tujuan organisasi dengan memanfaatkan alat/sarana yang tersedia semaksimal mungkin. Dengan adanya manajemen yang baik maka manajemen kinerja juga sangat diperlukan dalam mensukseskan suatu tujuan yang ingin dicapai. Maka dari itu dengan adanya manajemen kinerja yang baik maka dapat meningkatkan kinerja dari semua potensi yang dimiliki, dan juga manajemen diperlukan untuk kemajuan, dan pertumbuhan serta perkembangan agar lebih baik lagi.

Perkembangan BUMK masih terhambat oleh dana yang belum mencukupi. Hal ini mengakibatkan BUMK masih belum sesuai dengan konsep yang disampaikan oleh Santosa, karena Dana Desa masih belum sepenuhnya membiayai program Pemerintahan Kampung serta pemberdayaan masyarakat. Dan juga perkembangan BUMK yang masih stagnan artinya belum berkembang secara pesat dan ini mengakibatkan kualitas BUMK masih rendah.

Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi (birokrat). Diantara patologi jenis ini antara lain, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, menerima suap, arogansi dan intimidasi, kredibilitas rendah, dan nepotisme.

Patologi yang timbul karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan

kecakapan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional. Diantara patologi jenis ini antara lain, ketidaktepatan dan ketidaktepatan, ketidakmampuan menjabarkan kebijakan pimpinan, rasa puas diri, bertindak tanpa pikir, kemampuan rendah, tidak produktif, dan kebingungan.

Patologi yang timbul karena karena tindakan para anggota birokrasi melanggar norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diantara patologi jenis ini antara lain, menerima suap, korupsi, ketidakjujuran, kleptokrasi, dan *mark up* anggaran

Patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrasi yang bersifat disfungsi atau negatif. Diantara patologi jenis ini antara lain, bertindak sewenang-wenang, konspirasi, diskriminatif, dan tidak disiplin.

Patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi di lingkungan pemerintah. Diantara patologi jenis ini antara lain, eksploitasi bawahan, motivasi tidak tepat, beban kerja berlebihan, dan kondisi kerja kurang kondusif.

Fenomena patologi birokrasi terjadi sebagai hasil interaksi antara struktur birokrasi yang salah dan variabel lingkungan yang salah. Struktur birokrasi yang hierarkis berinteraksi dengan budaya masyarakat yang paternalistik, sistem politik yang tidak demokratis dan ketidakberdayaan kelompok masyarakat madani cenderung melahirkan perilaku birokrasi paternalistik yang merugikan kepentingan publik.

Dengan kata lain bahwa patologi birokrasi bukan hanya disebabkan oleh struktur birokrasi yang salah dan tidak tepat, seperti hierarki yang berlebihan, prosedur yang rigid, fragmentasi birokrasi yang terlalu banyak, dan masalah struktur lainnya. Selain masalah struktural, penyakit birokrasi disebabkan juga oleh interaksi berbagai variabel yang saling berkaitan

antara satu sama lainnya, baik yang terdapat dalam struktur birokrasi, budaya birokrasi, maupun variabel-variabel lain yang terdapat dalam lingkungan. Termasuk di dalam variabel lingkungan itu adalah budaya masyarakat, sistem politik yang kurang demokratis, dan kelompok masyarakat madani yang tidak mampu menjalankan fungsi kontrol.

SIMPULAN

Patologi Birokrasi Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kampung di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah. Penyebab patologi dalam BUMK adalah rendahnya sumberdaya manusia dan memiliki keterbatasan dalam mengelola penggunaan anggaran yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan anggaran dan penggunaan pendanaan BUMK kebanyakn sebagai simpan Pinjam, yang tidak dapat dikembalikan oleh masyarakat,

Faktor terjadinya patologi Birokrasi dalam Badan Usaha Milik Kampung di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah.

Sumber daya manusia hambatan yang dialami oleh sumber daya manusia di kecamatan Bebesen, dalam mengelola BUMK di masing-masing Kampung. Tidak adanya pengaturan pengupahan yang diatur oleh Qanun Kampung ataupun dalam Qanun Kampung tentang BUMK dan pengupahan terhadap struktur BUMK itu sendiri.

UCAPAN TERIMAKASIH (Optional)

Trima kasih kepada fakultas ilmu sosial dan Ilmu Politik, yang telah memberikan arahan dan bimbingan, serta kepada Istri dan keluarga tercinta yang telah mendukung sepenuhnya dalam Pembuatan artikel ini. Ucapan terimakasih

DAFTAR PUSTAKA

Dwiyanto, A. (2003). *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan

Kebijakan Universitas Gadjah Mada.

Hardiyansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasi*No Title. Yogyakarta: Gava Media.

Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada Press.

Joesyiana, K. (2018). PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN OBSERVASI LAPANGAN (OUTDOR STUDY) PADA MATA KULIAH MANAJEMEN OPERASIONAL (Survey pada Mahasiswa Jurusan Manajemen Semester III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Persada Bunda). *Pendidikan Dan Ekonomi Akuntansi*, 6(2), 90–103. Retrieved from <https://journal.uir.ac.id/index.php/Peka/issue/view/228>

Litjan, P. S. (2011). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, Implementasi*. Jakarta. Jakarta: Salemba Humanika.

Moleong, L. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Poltak, L. S. (2006). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Siagian, S. P. (2000). *Patologi Birokrasi: Analisis, Desain dan Aplikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Suardeyasasri. (2010). *metode penelitian kualitatif*. Jakarta: PT Gramedia.

Suharsimi, A. (2011). *Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik /*. Jakarta: Rineka Cipta.

Thoha, M. (2005). *Birokrasi Politik di Indonesia*. Jakarta. Jakarta: Raja Grafindo Persada.